

**ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA MADIUN**

SKRIPSI

Oleh :

Danan Qohari Ma'arif

NIM. 05040422068



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danan Qohari Ma'arif
NIM : 05040422068
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : *Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Madiun*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 5 Desember 2025

Yang menyatakan,



Danan Qohari Ma'arif
NIM. 05040422068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

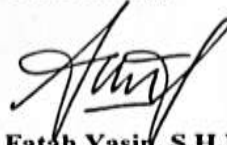
Nama : Danan Qohari Ma'arif

NIM : 05040422068

Judul : Analisis Yuridis Dan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 05 Desember 2025
Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Danan Qohari Ma'arif


NIM. : 05040422068

Judul : Analisis Yuridis Dan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Madiun

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.L., M.H.

NIP. 198905172015031006

Penguji III


Elva Imeldatur Rohmah, M.H.

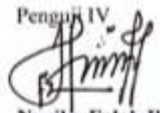
NIP. 199204022020122018

Penguji II


Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji IV


Nurika Fatah Ilmania, M.H.

NIP. 200005032025052009

Surabaya, 2 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Saqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Danan Qohari Ma'arif
NIM : 05040422068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : dananqoharimaarif@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Madiun

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis

(Danan Qohari Ma'arif)

ABSTRAK

Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi menuntut pelaksanaan yang tertib dan berintegritas, termasuk dalam pemasangan alat peraga kampanye. Kota Madiun pada Pilkada 2024 mengalami pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 70 dan 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 64 dan 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2024 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018, seperti pemasangan di fasilitas umum, pepohonan, tiang listrik, dan jalan protokol. Fenomena ini mencerminkan lemahnya kepatuhan hukum peserta pemilu dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini mengkaji bentuk pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Madiun dan analisis yuridis dan *fiqh siyāsah* terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Madiun guna untuk menemukan solusi komprehensif dalam menegakkan ketertiban demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan *sociolegal jurisprudence*, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan dokumentasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan tim sukses pasangan calon. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang, komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Perda. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menghubungkan teori hukum positif dan *fiqh siyāsah* terhadap realitas pelanggaran di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran terjadi dalam lima bentuk: pemasangan di pepohonan, tiang listrik, jalan protokol, instansi pemerintah, dan rumah warga tanpa izin. Data menunjukkan 40% tim sukses melakukan pelanggaran, dengan pasangan pilgub Luluk-Lukman, Khofifah-Emil dan Risma-Gus Han serta pada pilkada Inda-Aldy, Maidi-Bagus P dan Bonie-Rizky. Pada pilgub mencatatkan pelanggaran tertinggi sebanyak 57 kasus dan juga pada Pilkada mencatatkan pelanggaran tertinggi sebanyak 185 kasus. Faktor penyebab meliputi persaingan politik ketat, pemahaman regulasi minim, pengawasan lemah, dan tekanan internal partai. Secara yuridis, pelanggaran ini bertentangan dengan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 70 dan 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 64 dan 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2024 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018. Perspektif *Fiqh Siyāsah* menegaskan pelanggaran ini tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga prinsip ketaatan kepada *'aqd ijtimā'ī* serta mencederai *maṣlahah 'āmmah*. Pelanggaran itu bertentangan dengan *dustūriyyah* dan menuntut penegakan *tanfīdzīyah* melalui *ta'zīr* administratif yang adil. Pelanggaran alat peraga kampanye pada pilgub di pepohonan dan instansi pemerintah, serta pada pilkada di jalan protokol, tiang listrik, dan rumah warga.

Melihat hal di atas maka diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, sosialisasi intensif, penegakan sanksi tegas, serta pembangunan kesadaran etika politik berbasis nilai Islam agar kampanye berjalan tertib dan demokratis sesuai prinsip hukum dan kemaslahatan umat.

DAFTAR ISI

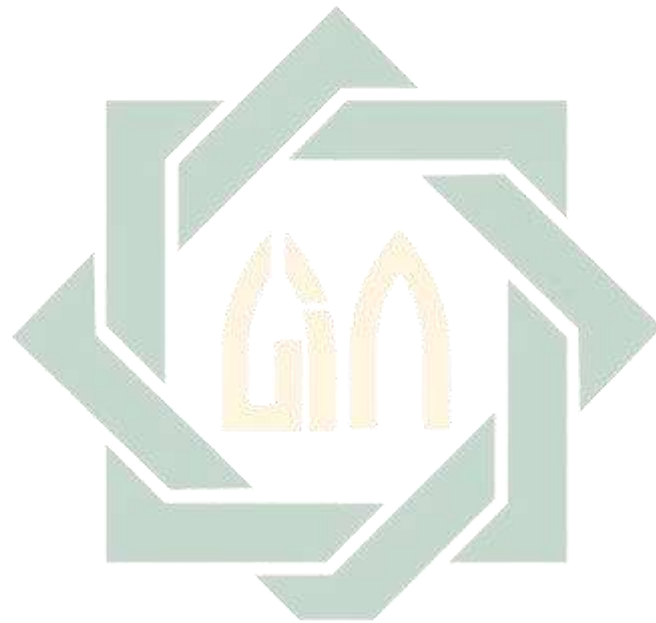
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Landasan Teori.....	18
H. Definisi Operasional.....	22
I. Metode Penelitian.....	26
J. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II PEMILU DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTURIYYĀH</i>	38
A. Pemilihan Umum.....	38
B. Pilkada di Indonesia.....	59
C. <i>Fiqh siyāsah</i>	64
BAB III PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA MADIUN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MADIUN TAHUN 2024	82
A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Madiun.....	82

B. Faktor Penyebab Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye.....	91
C. Kendala serta Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kota Madiun.....	93
BAB IV ANALISIS PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA MADIUN PADA PILGUB DAN PILKADA KOTA MADIUN TAHUN 2024.....	110
A. Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Madiun pada Pilgub dan Pilkada Tahun 2024.....	110
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh Tanfidziyah</i> terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Madiun pada Pilkada Tahun 2024.....	119
BAB V PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN.....	149

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pasangan Calon Pilgub Jatim.....	107
Tabel 2 Pasangan Calon Pilkada Madiun.....	107



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pelanggaran alat peraga kampanye di pohon.....	86
Gambar 2 Pelanggaran alat peraga kampanye di lingkungan instansi pemerintah..	87
Gambar 3 Pelanggaran alat peraga kampanye di jalan protokol pemerintah.....	88
Gambar 4 Pelanggaran alat peraga kampanye pada tiang listrik.....	89
Gambar 5 Pelanggaran alat peraga kampanye di lingkungan rumah warga.....	90
Gambar 6 Wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.....	161
Gambar 7 Wawancara dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Madiun.....	162
Gambar 8 Wawancara dengan anggota timses.....	162



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aermadepa, Jayanti Puspitaningrum. *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia (Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)*. Jakarta: Sonpedia, 2024, 44.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, 26-29.
- Asma, Siti Nor. *Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Setia, 2024, 26.
- Asma, Siti Nor. *Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Setia, 2024, 32.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2022, 42.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Sharī'ah*, Jilid II. Jakarta: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1991, 7-10.
- Bambang, Benny Irawan. *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*. Jakarta: Pusaka, 2007, 58.
- Budhiati, Ida dan Topo Santoso. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 48.
- Bintar R, Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018, 169.
- Chamidah, Siti. *Pemilu 2009, Pemasaran Politik dan Lembaga Survei* Jakarta: Pustaka Setia 1, 2009, 6–10.
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah: Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2013, 47.
- Farih, Amin dan Mukhsin Jamil. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008, 38.
- Imam, Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*. Jakarta: Qisthi Press, 2014. 24.
- Iqbal, Muhammad. *Konstekstualisasi Doktrin Politik dalam Hukum Islam*. Jakarta:

- Kencana, 2014, 18.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2011, 24-26.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2011, 29-32.
- Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*. Jakarta: Pustaka Setia 19, 2012, 23–24.
- Jubair Situmorang. *Pemikiran Politik Ketatanegaraan: Siyasah Dusturiyah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2016, 34.
- Komisi Pemilihan Umum, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*. Badan Pengawas Pemilu RI: Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2022, 82–89.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, 23.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014, 16.
- Muhdam Labolo. *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, 45.
- Muwahid, Lutfil Ansori, dan Imron Mustofa, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: FSH UINSA, 2025.
- Sutisna. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021, 120.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Univeritas Indonesia, 1993, 12–13.
- Sukaraja, ahmad. *Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dengan Tulisannya Fikih Siyasah*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003, 179.
- Sukaraja, ahmad. *Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dengan Tulisannya Fikih Siyasah*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003, 193.
- Syamsuddin, Haris. *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PPW-LIPI,

1997, 50-52.

Jurnal

Andrizal, Eddy Asnawi, dan Tatang Prayoga, “Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru,” *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.7 No.01, 2025, 108

Azis, Jafar Abdul dan Ali Azhar, “Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi terhadap Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Serentak Wilayah Hukum Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir,” *Indragiri Law Review* Vol. 2 No. 2, 2024, 25–32.

Arifulloh, Achmad, “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 9 (2015): 35.

Arifulloh, Achmad, “Pemilu yang Damai Mewujudkan Nilai Nasionalis yang Tinggi” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 2 (2016) 17.

Anam, Choirul. “Pengaturan Alat Peraga Kampanye dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 6, no. 2 (2018): 113–18.

Ali Muchasan, M. Syarif, dan Dhuhaa Rohmawan, “Maqāṣid al-Syarī’ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr,” *Jurnal Inovatif* 9, no. 1 (2023): 133–151.

Arifulloh, Achmad, “Pelaksanaan Pemilu Serentak yang Damai.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2015): 23.

Arifulloh, Achmad, “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6, no. 2 (2017): 16.

Azizah Nst, Nur, A. Zarkasi, dan Iswandi, “Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 74–81.

Cipto, Bambang, “Pemilihan Presiden 2004 dan Kualitas Demokrasi.” *Jurnal Unisia* 27, no. 19 (2004): 38–40.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss51.art6>.

Damayanti, Rizki, “The Relevance of Fiqh Siyasah Dauliyah and Religion as Indonesian Soft Power in International Relations.” *De Jure: Jurnal Hukum*

Dan Syar'iah 15, no. 9 (2023): 343–365. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23371>.

Damanik, Syabrina Yolanda Chansa, “Pelanggaran Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 11–14.

Fahmi, Khairul, “Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 9 (2016): 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>.

Fatmawati, “Pengertian Fiqh Siyasah secara Umum.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 3, no. 7 (2019): 11.

Fareza, Hefrian, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pemilu Bandar Lampung* 3, no. 5 (2023): 16.

Fareza, Hefrian, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pemilu Bandar Lampung* 3, no. 5 (2023): 23.

Hadi, Hendra, “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris,” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, No 2, (2023) 17.

Hutapea, Brahmantya Putra, Simandjuntak, Jeremia Putra Ferliano dan Freidelino P.R.A. de Sousa, “Pemasangan Alat Peraga Kampanye tanpa Seizin Pemilik Tempat,” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* 8, no. 2 (2024): 542–549.

Irwansyah Dan Zenal Setiawa, “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 9 (2023). 71.

Ilyandi, Rendy, “Pemilu yang Demokratis dan Berkeadilan dalam Perspektif Teori.” *Journal of Qur’anic Studies* 5, no. 10 (2024): 24.

Ilyandi, Rendy, “Pemilu yang Demokratis dan Berkeadilan” *Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 21 (2019): 56.

Jafar, Wahyu Abdul, “Fiqh Siyasah dalam prespektif Al-Qur’an dan HadisT.” *AL Ijarah: Juenal Pemerintah dan Politik Islam* 3, no. 5 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

- Kamal, Ahmad Mustafa, "Jenis Data dan Sumber Data dalam Penelitian." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 9 (2016): 33.
- Kolang, Fabio Emiliano, Audi H. Pondaag dan Josina E. Londa, "Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Adil, dan Bersih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Lex Administratum* 2, no. 7 (2022): 9–11.
- La, Samsu, "Al-Sulṭah al-Tasyri'iyah, al-Sulṭah al-Tanfiziyyah, al-Sulṭah al-Qadā'iyah," *Jurnal Tahkim* 13, no. 1 (2017): 155–171.
- Liando, Daud M, "Pemilu dan Partisipasi Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden." *Jurnal Kewarganegaraan* 3, no. 9 (2016): 37.
- Lincoln, Abraham, "Definisi Pemilihan Umum dan Pilkada." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 7 (2017): 13–115.
- Marzuki, Suparman, "Kajian Hukum Administrasi Negara terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 3, no. 7 (2020): 316.
- Marzuki, Suparman, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15 (2008): 393–394. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham, "Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Binamulia Hukum* 5, no. 18 (2019): 15.
- Muzaki, Achmad, "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasaḥ," *Prosiding Nasional IAIN Kediri* 7 (2024): 35–52.
- Mulyawan, Fitra, dan Zennis Helen, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Diluar Waktu Kampanye pada Pemilu 2024." *Jurnal Dinamika Hukum* 6, no.3 (2024): 23–26.
- Muthalib, Abdul Salman dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, "Siyasaḥ Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 22 (2019): 54.

- Muhaki, "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Journal of Social Science and Economics* Vol. 2 No. 2, 2024, 167–181.
- Nashrullah, Jauhar, "Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua," *LEX Renaissance* 8, no. 2 (2023): 214–223.
- Ningsih, Surya, "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas." *Jurnal Dinamika Hukum* 7, no. 9 (2024): 14.
- Pratiwi, Uswa dan Mayarni, "Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 56.
- Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, and Wismanto Wismanto, "Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam." *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no 12 (2024): 18–30. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>.
- Rahmatullaah, UIN Sayyid Ali, "Teknik Pengumpulan Data Penelitian." *UNES Law Review* 11 (2023): 17–18.
- Respationo, H.M. Soerya, "Pemilihan Kepala Daerah dalam Demokerasi" *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 7(2013): 355.
- Saputra, Danis Tri, M.Prakoso Aji, Anwar Ilmar, and Mansur Juned, "Partai Islam dan Pemilu 2024." *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies* 6, no. 1 (2024): 1–41. <https://doi.org/10.33822/jpds.v6i1.9531>.
- Simamora, Janpatar, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 14. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Sinaga, Parbuntian, "Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945." *Binamulia Hukum*, 7, no. 12 (2018): 17. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>.
- Signora, Khalisa Aisyah, "Sistem Demokerasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2,

- no. 7 (2023): 19–20. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.
- Siregar, Nur Fadla Ziada, “Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dan Inggris pada Negara Demokrasi.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2, no. 7 (2022): 33–37.
- Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, “Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam,” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 161–176.
- Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* Vol.16 No.02, 2023, 101–113.
- Sjadzali, Munawir, “Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,.” *Jurnal Daulah Islamiyah* 2, no. 9 (1993) 3–6.
- Taniadya, Vicko, Reni Putri Anggraeni, dan Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, “Strategi Perlindungan Pohon pada Tahapan Kampanye Pilkada 2024,” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 5 No. 2, 2024, 159–182.
- Tontowa, Sri Lena, Donald A. Rumokoy, dan Tommy F. Sumakul, “Kajian Yuridis Pemasangan Baliho Kampanye Pemilihan Umum 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana Diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum,” *Lex Administratum* Vol. 13 No. 3, 2025, 18.
- Windyastuti, Dwi, “Studi Perilaku Pemilih pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan,” *Jurnal Cita Hukum* 21, no. 2 (2019): 6–8.
- Windyastuti, Dwi, “Studi Perilaku Pemilih pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan.” *Jurnal Cita Hukum* 21, no. 2 (2019): 22.
- Wibowo, Arif Prasetyo, Eka Wisnu Wardhana, T Heru Nurgiansah, “Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Kewarganegaraan* 1, no. 19 (2022): 6.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum:

Studi Eksploratif di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024) 14.

Yasser Arafat, “Pilkada antara Pertarungan Gagasan dan Perebutan Kekuasaan.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8, no. 9 (2022): 35.
<https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i2.69>.

Yunita, Putri, and Siti Tiara Maulia, “Pemilihan Umum sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia” *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 37–39.
<https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.

Yurisna, Andini, Nur Amalina Sabrina, Keisha Jovie Dermawan dan Greycia Febrina, “Evaluasi Penggunaan Baliho sebagai Media Kampanye dalam Perspektif Sila Kedua Pancasila.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 31 (2023): 13.

Yusuf, Mohd Affandi Mohd dan Nor Izani Abdullah, “Siyasah Syar’iyyah: A Study of Concepts Based on Sirah and The History Of Islamic Civilization.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, no. 11 (2022): 98–101.

Skripsi

Adillah, Furqan. “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Fadhila, Isna Ariza. “Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Vebrian, Helen. “Analisis Hukum terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Studi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pekanbaru).” Skripsi, UIN Suska, 2023.

Wibana, Argia Dafa. “Penertiban Alat Peraga Kampanye oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.” Skripsi, ASDAF Kota Bandung, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Wawancara

Alfian, Mohda. Wawancara Kepala bagian hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Badan Pengawas Pemilu Kota Madiun, *Wawancara*, September 23 2025.

Anjarsari, Pita. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, *Wawancara*, September 23 2025.

Pramana, Bryan. Wawancara tim sukses Pilwalikot dari Paslon Nomor 2 yaitu Dr. Drs. Maldi, S.H., M.M, M.Pd dan F. Bagus Panuntun, *Wawancara*, September 23 2025.